



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ICHWAN QOMARI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 209845

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 700.890.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/150 m2 di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 164.850.000
2. Tanah Seluas 1436 m2 di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 125.040.000
3. Tanah Seluas 1380 m2 di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 143.000.000
4. Tanah Seluas 3770 m2 di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 204.000.000
5. Tanah Seluas 1520 m2 di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 353.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 258.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PICK UP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 83.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 321.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 13.386.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---



Sub Total	Rp.	1.389.076.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.389.076.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.